

Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Perkapita Pada Provinsi Kalimantan Barat

Erta Lexi Seviana¹, Nadya Eka Putri², Ayu Umyana³

¹Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia, b1031221236@student.untan.ac.id

²Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia, nadyaekaputri88@gmail.com

³Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia, ayuumyana@ekonomi.untan.ac.id

Corresponding Author: b1031221236@student.untan.ac.id¹

Abstract: *This research was conducted to examine and measure the effect of capital expenditure, locally-generated revenue (PAD), and balancing funds on the increase of per capita income in the Province of West Kalimantan during the period from 2019 to 2023. The research applied analysis period by utilizing existing data from official publication of the Central Bureau of Statistics (BPS) of West Kalimantan during the relevant time period. The study covers all 14 regencies and cities within the province. The findings reveal that, partially, capital expenditure does not have a significant effect on per capita income. In contrast, both PAD and balance funds show a positive and significant influence on per capita income at the regency/city level, indicating that optimizing regional revenue and effectively managing fiscal transfers from the central government are crucial for enhancing the welfare of local communities.*

Keywords: *Capital Expenditures, Local Own Revenue, Balancing Funds, Per Capita Income*

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan mengukur pengaruh belanja modal, pendapatan asli daerah (PAD), dan dana perimbangan terhadap peningkatan pendapatan per kapita di wilayah Provinsi Kalimantan Barat selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Peneliti menerapkan metode analisis kuantitatif dengan memanfaatkan data yang ada dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat pada kurun waktu terkait. Objek dalam penelitian ini mencakup seluruh pemerintah daerah di 14 kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut. Temuan dari analisis menunjukkan bahwa secara parsial, belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pendapatan per kapita. Sebaliknya, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terbukti memberikan pengaruh yang positif dan signifikan dalam mendorong pertumbuhan pendapatan perkapita pada tingkat kabupaten/kota di Kalimantan Barat, yang mengindikasikan pentingnya optimalisasi penerimaan daerah dan pengelolaan transfer dana dari pusat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatam Perkapita

PENDAHULUAN

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memainkan peran strategis dalam mengelola sumber daya fiskal guna mendorong peningkatan kualitas hidup penduduk, dilihat dari kondisi ekonomi seperti pendapatan rata-rata. Pendapatan rata-rata menjadi acuan penting bagi kemajuan ekonomi daerah dan menjadi ukuran kesejahteraan warga (Todaro, M.p., & Smith, 2020). Belanja modal berperan dalam mendanai pembangunan infrastruktur yang esensial bagi kelancaran aktivitas ekonomi lokal (Mardiasmo, 2018a). Sementara itu, PAD menunjukkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal sebagai sumber pembiayaan mandiri. Di sisi lain, dana perimbangan hadir untuk mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah serta mempercepat proses pemerataan pembangunan nasional. Ketiga aspek ini secara sinergis memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan taraf hidup masyarakat.

Seiring meningkatnya produktivitas ekonomi, penghasilan masyarakat akan mengalami peningkatan, dan akhirnya berperan dalam pemenuhan pendapatan per kapita (Musgrave, 2017). Inilah yang menjadi dasar harapan bahwa peningkatan belanja modal tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan kemajuan fisik, melainkan untuk menciptakan dinamika ekonomi yang lebih produktif, yang menguntungkan setiap orang melalui lapangan pekerjaan. Jadi, Semakin besar dana untuk membangun fasilitas, maka semakin tinggi pula produktivitas ekonomi yang dihasilkan, yang pada akhirnya menghambat peningkatan pendapatan warga negara dan kualitas lingkungan diberbagai tempat.

Belanja modal yang tepat sasaran dapat mempercepat produktivitas ekonomi, PAD yang tinggi mencerminkan keberdayaan ekonomi lokal, sementara dana perimbangan berfungsi sebagai stabilisator fiskal bagi daerah yang belum mampu membiayai sendiri kebutuhan pembangunan (Sukirno, 2016). Sementara itu, PAD yang berasal dari pajak lokal, dan lain-lain-lain menunjukkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi setempat untuk mendukung pembangunan (Halim A, 2016). PAD memegang peran yang sangat krusial dalam struktur keuangan pemerintah daerah, karena menjadi indikator utama kemandirian fiskal suatu wilayah. Tingginya tingkat kemandirian fiskal menunjukkan bahwa suatu daerah mampu mengelola dan memanfaatkan potensi ekonominya secara optimal (Gujarati, D.N., & Porter, 2018). Pajak daerah dan retribusi mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat setempat, sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah menunjukkan sejauh mana daerah dapat memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk mendukung pendapatan (Mardiasmo, 2018b). Dengan demikian, PAD mengindikasikan bahwa pemerintah daerah besar tertentu mampu mengenali, mendukung, dan mengembangkan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan umum penduduk.

Seiring dengan meningkatnya kontribusi PAD pada keseluruhan lahan yang tersedia untuk pembangunan, maka semakin meningkat pula kapasitas fisik daerah untuk memenuhi tuntutan pembangunannya. Tujuan utama dari dana perimbangan adalah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan mengurangi perbedaan geografis antardaerah (Pradana, 2016). Dengan keberadaan dana ini, daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas dapat menjalankan layanan publik dan pembangunan dengan lebih optimal. Selain itu, dana perimbangan juga memiliki peran untuk mendukung tercapainya pemerataan hasil pembangunan diseluruh kawasan, sehingga bisa mengurangi kesenjangan antar daerah. Oleh karena itu, seiring bertambahnya jumlah lahan yang dimanfaatkan guna pembangunan, area yang dimaksud juga menjadi lebih mampu mendukung pembangunan dan mengurangi ukuran area fisiknya.

Diharapkan keterkaitan antara modal, PAD, dan perimbangan akan menghasilkan perekonomian yang makmur di Provinsi Kalimantan Barat, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan rata-rata penduduk secara umum. Akan tetapi, implementasi ketiga elemen tersebut masih menemui sejumlah hambatan. Keterbatasan kapasitas fiskal, ketidakpastian kondisi ekonomi makro, serta permasalahan dalam tata kelola anggaran menjadi

kendala utama (BPS Kalimantan Barat, 2024). Data statistik tahun 2023 menunjukkan bahwa sumbangan PAD terhadap keseluruhan pendapatan daerah di Kalimantan Barat hanya sekitar 16,2%, Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai 47,8% dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sebesar 25,5% (Barat, 2023). Ketergantungan fiskal yang tinggi ini menandakan bahwa otonomi keuangan daerah masih lemah, yang berdampak pada keterbatasan dalam merealisasikan belanja modal secara produktif.

Permasalahan internal juga turut menghambat efektivitas penggunaan anggaran daerah. Laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kalimantan Barat Tahun 2023 mengidentifikasi beberapa isu penting, seperti ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan RPJMD dan RKPD, lemahnya koordinasi antar-OPD, serta keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa. Akibatnya, serapan anggaran pada semester pertama tahun anggaran cenderung rendah, sehingga proyek-proyek infrastruktur baru terlaksana secara masif menjelang akhir tahun anggaran. Pola pelaksanaan seperti ini berisiko menurunkan kualitas output proyek. Di samping itu, pemanfaatan teknologi digital yang seharusnya dapat mengoptimalkan PAD melalui layanan pajak dan retribusi berbasis elektronik, belum dimaksimalkan. Beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Barat masih tertinggal dalam pengembangan e-government, yang menyebabkan potensi pendapatan daerah dari sektor digitalisasi belum tergarap secara optimal.

Sebagian besar kota di Kalimantan Barat tampaknya belum merasakan dampak signifikan dari pengembangan e-government. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi peningkatan pendapatan daerah melalui digitalisasi belum tergarap secara maksimal. Berdasarkan situasi tersebut, penelitian ini difokuskan pada pertanyaan utama: sejauh mana belanja daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dana perimbangan berpengaruh terhadap pendapatan per kapita di Kalimantan Barat dalam kurun waktu 2019 hingga 2023? Banyak penelitian yang telah mengkaji hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan tingkat pendapatan per kapita. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh (Pubra, 2019) di Riau menunjukkan bahwa belanja daerah, PAD, dan dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita, baik secara simultan maupun sendiri-sendiri. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pengelolaan anggaran yang baik memiliki peran besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Meskipun demikian, tidak semua temuan penelitian menyebutkan hal ini. Dalam penelitian yang dilakukan di Provinsi Sumatera Utara mengandalkan model persamaan struktural (SEM). (Yustriawan, 2021) dan (SIMANJUNTAK, 2016), hasil penelitian modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada jangka panjang pada pendapatan per kapita. Ia juga menunjukkan bahwa dana perimbangan hanya memengaruhi pendapatan per kapita secara tidak langsung melalui belanja modal sebagai variabel antara, dan PAD tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap belanja modal. Ketidak konsistenan ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai efektivitas variabel fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, tujuan artikel ini adalah untuk memberikan wawasan lebih jauh tentang pengaruh modal, PAD, dan dana perimbangan pada pendapatan masing-masing kapita di Kalimantan Barat, baik secara terpisah maupun simultan, serta untuk menyoroti potensi penyebab perbedaan hasil penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan sumbangan teoritis bagi kajian ekonomi daerah dan menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan keuangan yang lebih tepat dan bijaksana dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di daerah.

Hipotesis:

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Per Kapita

Dalam teori pendapatan daerah, belanja modal yang teralokasi secara optimal mencerminkan tingkat efektivitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya fiskalnya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Mahmudi, 2019). Investasi pemerintah dalam infrastruktur, seperti jalan, jembatan, transportasi, dan fasilitas umum, tidak

hanya mempercepat sirkulasi barang dan jasa, tetapi juga memperkuat kerja sama antardaerah dan memacu pertumbuhan sektor-sektor produktif. Peningkatan kualitas infrastruktur ini secara langsung maupun tidak langsung mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bertambahnya pendapatan. Sejalan dengan pendekatan teori pertumbuhan endogen, belanja modal dipandang sebagai sarana strategis untuk memperkuat kapasitas produksi dan mempercepat akumulasi aset produktif jangka panjang. Dengan meningkatnya produktivitas wilayah, maka potensi peningkatan pendapatan per kapita pun semakin terbuka. Hasil penelitian oleh (Fernandes & Oktavia, 2021) yang dilaksanakan di Provinsi Riau menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita, baik secara simultan maupun parsial. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Per Kapita

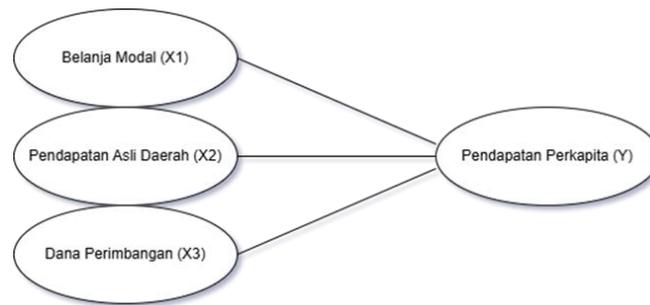
PAD memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk memberikan program pembangunan yang lebih kontekstual sesuai kebutuhan lokal. PAD bukan sekadar sumber dana pembangunan, melainkan juga cerminan kapasitas kemandirian fiskal suatu daerah. Dalam teori pertumbuhan ekonomi (Boediono, 2019), PAD berpotensi menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi apabila diintegrasikan secara cermat pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi daerah. Namun demikian, efektivitas PAD sangat ditentukan oleh tata kelola keuangan daerah, transparansi anggaran, serta komitmen terhadap hasil. Penelitian (Putri & Mauliyah, 2022) menegaskan bahwa PAD berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan per kapita di Provinsi Riau. Oleh karena itu, hipotesis dapat dirumuskan:

H2: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Per Kapita

Dana perimbangan mencerminkan mekanisme fiskal yang dirancang untuk menciptakan keadilan dan pemerataan antar daerah dalam hal kapasitas pembiayaan pembangunan (Halim A, 2016). Dalam teori pendapatan daerah, dana ini merupakan instrumen intervensi dari pemerintah pusat untuk membantu daerah-daerah yang belum mandiri secara fiskal. Jika dilaksanakan dengan baik, dana perimbangan dapat mendukung pengembangan berbagai program pembangunan yang merugikan peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Namun, ketergantungan yang berlebihan pada dana ini dapat dimanfaatkan guna meningkatkan potensi ekonomi lokal dengan mendorong inovasi dan kreativitas. Menurut teori pertumbuhan endogen, jika difokuskan pada sektor-sektor produktif seperti infrastruktur dasar, layanan pendidikan, dan kesehatan, dapat memengaruhi pertumbuhan daerah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Suryana, 2018) dan (Srinofril & Ananda, 2023), alokasi dana perimbangan khususnya melalui investasi belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita. Temuan ini mendukung hipotesis penelitian yaitu:

H3: Dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita.



Gambar 1. Rerangka Konseptual

METODE

Jenis penelitian kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang landasannya berada pada paham positivisme. Pendekatan ini menggunakan alat bantu sebagai instrumen penelitian dan menganalisis data secara statistik. Tujuannya adalah untuk memperkirakan jumlah populasi atau sampel menggunakan proses yang disebut random sampling (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif dimanfaatkan guna menilai hubungan antara variabel yang diteliti. Periode analisis data mencakup tahun 2019–2023, dan jenis data yang digunakan adalah data orde kedua. Kumpulan data kedua adalah informasi yang didapatkan melalui sumber selain penelitian asli, seperti dokumen nyata, hasil yang dipublikasikan, laporan lembaga, jurnal ilmiah, dan basis data dari organisasi terkait (Sugiyono, 2017).

Fokus kajian ini adalah Provinsi Kalimantan Barat yang dipilih karena data mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah bersifat komprehensif, berjangka panjang, dan mudah dianalisis, terutama dalam menilai dampak retribusi daerah, PAD, dan perimbangan dana pada pendapatan masyarakat. Data tersebut didapatkan melalui situs web Departemen Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id) dan Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id). Adapun hasil kajian ini adalah jumlah penduduk Kalimantan Barat terdiri dari dua kota dan dua belas provinsi. yang meliputi seluruh 14 wilayah administrasi. Data terkait retribusi daerah, PAD, dana perimbangan, dan pendapatan per kapita selama kurun waktu 2019–2023 termasuk dalam populasi ini. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah full sampling, yaitu setiap anggota populasi dianggap sebagai sampel kajian. Analisis data dilakukan mengandalkan statistik deskriptif, diikuti dengan uji asumsi klasik untuk memastikan validitas model, dan terakhir, analisis regresi berganda untuk menguji hubungan antar variabel secara simultan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu teknik statistika yang digunakan untuk mengetahui apakah residual suatu model regresi memiliki pola distribusi yang mendekati kurva normal. Proses ini penting karena dalam regresi linier salah satu syarat utama adalah residual harus mengikuti distribusi normal agar hasil perhitungan model dapat diinterpretasikan dengan tepat (Ghozali, 2018). Uji normalitas bertujuan untuk menilai unsur-unsur permasalahan dalam model regresi dengan memanfaatkan distribusi normal. Apabila nilai signifikansi (p) dalam penelitian ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual tidak berdistribusi normal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uji Kolmogorov-Smirnov menghasilkan signifikansi sebesar 0,200 yang lebih besar dari batas signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa distribusi residual telah memenuhi syarat normalitas, sehingga memperkuat reliabilitas model regresi yang digunakan.

Uji F (Simultan)

Dalam penelitian ini, digunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%. Nilai F hitung dibandingkan dengan tabel F untuk menilai apakah modal, faktor daerah, dan neraca keuangan

daerah memiliki hubungan yang signifikan dengan pendapatan per kapita (Ghozali, 2018). Yang perlu diperhatikan adalah nilai p untuk uji F adalah 85,514 dengan signifikansi 0,000000. Suatu model regresi dianggap signifikan secara simultan jika nilai p-nya di bawah 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PAD, belanja modal, dan dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDB per kapita. Selanjutnya, tabel ANOVA menunjukkan bahwa uji F memiliki nilai p sebesar 0,000000 dan nilai F sebesar 85,514. Artinya, secara keseluruhan model regresi ini signifikan, yang menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap pendapatan per kapita karena tingkat signifikansinya di bawah 0,05.

Tabel 1. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	225.365.440.576	3	75.121.813.525	85.514	.000 ^b
1 Residual	57.979.086.867	66	878.471.013		
Total	283.344.527.443	69			

Uji T (Parsial)

Untuk menggambarkan variabel terikat, Uji t menunjukkan tingkat signifikansi suatu variabel tertentu (Ghozali, 2018). Oleh karena itu, Uji t merupakan alat statistik yang dimanfaatkan guna menentukan beberapa perbedaan signifikan antara setiap variabel bebas dan variabel terikat.

Tabel 2. Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8.572.438	340.686		25.162	.000
1 Belanja Modal	-1,77E-06	.000	-.111	-1.391	.169
Pendapatan Asli Daerah	1,72E-05	.000	.978	14.361	.000
Dana Perimbangan	-9,29E-07	.000	-.187	-2.732	.008

Pada Uji t atau uji parsial, diketahui bahwa:

- a) Terdapat hubungan yang cukup erat dan positif antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pendapatan Per Kapita, dengan tingkat signifikansi antara 0,0000 sampai dengan 0,05. Artinya jika PAD meningkat, secara umum pendapatan rata-rata per orang di daerah tersebut juga meningkat. Jadi, PAD berperan dalam memengaruhi besarnya pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat.
- b) Secara statistik, pengaruh alokasi dana perimbangan terhadap pendapatan per kapita terbukti signifikan dan positif ($p = 0,008$). Semakin besar dana perimbangan, potensi peningkatan pendapatan per kapita justru dapat menurun, mungkin karena pemanfaatan atau penyalurannya yang tidak tepat. Oleh karena itu, sumber dana ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan penduduk di setiap provinsi di Kalimantan Barat.
- c) Sebaliknya, dengan nilai p hanya 0,169, Belanja Modal tidak berkorelasi signifikan dengan Per Kapita Pendapatan. Hal ini dapat dikaitkan dengan panjang jangka itu disebabkan oleh belanja modal atau anggaran yang tidak sepenuhnya selaras. Sebagai akibat dari belanja modal, masyarakat Provinsi Kalimantan Barat melihat penurunan pendapatan rata-rata.

Untuk menemukan persamaan regresi linier berganda model tersebut, kemudian dikurangi 1,774E-9 dari belanja modal, tambahkan 1,720E-8 ke PAD, lalu kurangi 9,288E-10 dari dana perimbangan. Ketepatan statistik dan matematika model ini membuatnya cocok untuk menjelaskan sebagian besar varians dalam pendapatan per kapita. Hasil analisis ini menyoroti pentingnya PAD sebagai mekanisme pendanaan pembangunan yang berdiri sendiri dan perlunya mengevaluasi kemandirian dana perimbangan dan mengalokasikan belanja modal.

Koefisien Determinasi (R)

Menurut (Ghozali, 2018) koefisien determinasi merupakan alat analisis yang dimanfaatkan guna menentukan apakah suatu model regresi tertentu dapat secara efektif menjelaskan variabel yang dihasilkan dari variabel dependen atau yang dipengaruhi. Angka ini, yang didasarkan pada angka 0 hingga 1, menunjukkan beberapa kontribusi variabel independen yang signifikan pada variabel dependen. Semakin besar angka 1, semakin besar kemampuan model untuk menjelaskan variasi yang terjadi. Dengan kata lain, nilai R² menunjukkan beberapa sifat signifikan dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel dependen.

Tabel 3. Hasil Uji R

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.892 ^a	.795	.786	93.726.784

Berdasarkan penelitian, sekitar 79,5% perubahan pendapatan per kapita dapat dijelaskan oleh tiga variabel utama, yaitu Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan. Hal tersebut tercermin dari nilai R Square sebesar 0,795. Selanjutnya, terdapat faktor lain di luar model regresi yang turut mempengaruhi, setidaknya sekitar 20 persen. Nilai R sebesar 0,892 pada Ringkasan Model menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara seluruh variabel yang dianalisis secara simultan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model ini memiliki akurasi yang tinggi dalam menjelaskan fenomena yang diteliti.

Pembahasan

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Perkapita

Berdasarkan hasil analisis regresi, belanja modal memiliki koefisien regresi sebesar $1,774 \times 10^{-9}$ dan nilai signifikansi di atas 0,05, yaitu tidak signifikan secara statistik. Tanda negatif pada koefisien menunjukkan bahwa secara arah, peningkatan belanja modal justru diikuti oleh penurunan pendapatan perkapita. Namun karena nilai signifikansi tidak memenuhi syarat uji $t < 0,05$, maka pengaruh tersebut dinilai tidak berarti secara statistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan perkapita. Temuan ini sejalan dengan beberapa studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Rusmita, 2016) yang menyatakan bahwa belanja modal sering kali tidak berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka pendek. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran, keterlambatan pelaksanaan proyek, atau pemilihan jenis belanja modal yang kurang tepat sasaran. Meski demikian, belanja modal tetap memiliki peran strategis dalam membangun infrastruktur dasar yang bersifat jangka panjang, namun dampaknya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat baru akan terasa setelah beberapa tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa:

H1: Belanja modal tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Perkapita

PAD menunjukkan pengaruh yang sangat kuat dan signifikan terhadap pendapatan perkapita. Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi sebesar $+1,720 \times 10^{-8}$, nilai t-hitung sebesar 14,361, dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh PAD terhadap pendapatan perkapita adalah positif dan signifikan.

PAD memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan perkapita. Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah daerah memiliki peluang lebih baik untuk berinvestasi dalam program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila potensi PAD-nya lebih tinggi. (Hidayati et al., 2022), menemukan bahwa PAD merupakan ukuran yang baik

untuk kemandirian fiskal suatu daerah; daerah dengan PAD yang tinggi cenderung lebih bijak dalam membelanjakan dana publik, sehingga meningkatkan pendapatan penduduknya. Hasil penelitian kami menguatkan hal ini. Maka dapat disimpulkan bahwa:

H2: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Perkapita

Pemindahan dana dari pemerintah pusat ke daerah yang dikenal dengan istilah dana perimbangan, ternyata memberikan pengaruh yang negatif terhadap pendapatan rata-rata penduduk. Berdasarkan analisis data, koefisien regresi menunjukkan angka $-9,288 \times 10^{-10}$, dengan nilai t sebesar -2,732 dan tingkat signifikansi hanya 0,008 persen. Karena angka signifikansi ini di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh yang cukup besar, meskipun sayangnya pengaruhnya negatif. Di sisi lain, dana perimbangan seharusnya mampu memberikan dampak yang positif terhadap pendapatan masyarakat. Artinya, penyaluran dana dari pusat ke daerah seharusnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama pada daerah yang pendapatan asli daerahnya rendah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Marliana et al., 2022), yang menyatakan bahwa dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum (DAU), memiliki kontribusi besar dalam mendukung pembiayaan belanja publik yang berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Dengan demikian, dana perimbangan berperan sebagai instrumen pemerataan fiskal yang dapat mengurangi ketimpangan antarwilayah dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara agregat. Maka dapat disimpulkan bahwa:

H3: Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita

KESIMPULAN

Penelitian tentang pengaruh belanja modal, pendapatan asli daerah (PAD), dan dana perimbangan terhadap pendapatan per kapita di pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa belanja modal tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita. Hal ini menunjukkan bahwa investasi aset pemerintah provinsi belum sepenuhnya efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi penduduk selama periode penelitian. Di sisi lain, PAD dan dana perimbangan terbukti memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita di Kalimantan Barat selama periode 2019–2023. Hal ini mengindikasikan bahwa optimalisasi efisiensi sumber pendapatan daerah dan alokasi dana dari penduduk melalui mekanisme perimbangan dana sangat membantu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan kata lain, seiring dengan peningkatan PAD dan perimbangan dana, maka akan semakin meningkat pula jumlah uang yang dapat diperoleh setiap provinsi di Kalimantan Barat per kapita.

Penelitian ini tidak luput dari kekurangan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Cakupan penelitian ini terbatas, hanya menyoroti Kalimantan Barat. Variabel yang diteliti adalah seputar permodalan, PAD, dana perimbangan, dan pendapatan per kapita. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya cakupannya diperluas, dengan mengkaji provinsi atau daerah lain di Indonesia. Selain itu, sebaiknya periode penelitian juga diperpanjang. Dengan begitu, hasil yang diperoleh akan lebih mendalam, mewakili kondisi terkini, dan tentu saja komprehensif, terutama dengan memanfaatkan data dari situs resmi pemerintah.

REFERENSI

- Barat, B. K. (2023). *Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023*. BPS Kalimantan Barat.
- Barat, B. K. (2024). *Laporan Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat 2023*.
- Boediono. (2019). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFPE.
- Fernandes, J., & Oktavia, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi

- Umum Terhadap Belanja Modal Pada 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic*, 5(1), 61–70. <https://doi.org/10.36057/jips.v5i1.462>
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D.N., & Porter, D. C. (2018). *Basic Econometrics (5th ed)*. McGraw-Hill.
- Halim A. (2016). *Keuangan Daerah : Konsep dan Aplikasinya*. Rajawali Pers.
- Hidayati, S. W., Masud, M., & Sjarlis, S. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016-2020. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 3(April), 5–24.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018a). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mardiasmo. (2018b). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Andi.
- Marliana, R., Prasetyo, A. S., & Yulianto, P. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dana Bagi Hasil (Dbh) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Belanja Modal Di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(2), 620–640. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i2.489>
- Musgrave, R. . (2017). *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill.
- Pradana. (2016). *Dana Perimbangan*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Pubra, S. S. M. (2019). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Perkapita pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Riau 1 Sahala. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Putri, E. S., & Mauliyah, N. I. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 2(2), 108–117. <https://doi.org/10.25047/asersi.v2i2.3603>
- Rusmita, S. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 5(3), 237. <https://doi.org/10.26418/jebik.v5i3.19083>
- SIMANJUNTAK, E. A. P. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kab/Kota Diprovinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82–91.
- Srinofril, W., & Ananda, F. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021. *Journal Of Social Science Research*, 2(1), 951–964.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2016). *Makro ekonomi : Teori Pengantar*. Rajawali Pers.
- Suryana, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 9(2), 67–72. <https://doi.org/10.17509/jimb.v9i2.14000>
- Todaro, M.p., & Smith, S. c. (2020). *Economic Development*. Pearson.
- Yustriawan, D. (2021). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Perkapita melalui Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 5, 717–725. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.609>